

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk padat di dunia. Oleh sebab itu segala upaya dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia terus di kembangkan agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul yang tidak membebani negara. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia yang unggul yaitu melalui pendidikan. Melalui pendidikan individu dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki guna mempertahankan kehidupannya serta meningkatkan martabatnya. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sistem pendidikan terlihat dari pergantian kurikulum dari waktu ke waktu. Hal ini di maksudkan untuk terus memperbaiki sistem pendidikan Indonesia yang di rasa belum tepat dan belum sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia.

Selain pergantian kurikulum, Indonesia kini menerapkan pendidikan karakter yang wajib bagi semua pihak. Pendidikan karakter kini semakin sering diangkat menjadi wacana publik. Wacana tersebut lebih sering berisi tentang kritik terhadap pendidikan yang nampaknya lebih mengedepankan kemampuan intelektual akademis dibanding pentingnya pengembangan karakter. Padahal sebenarnya kemampuan intelektual akademis jika tidak di imbangi dengan karakter yang baik maka tidak akan berguna bahkan membahayakan masyarakat lainnya.

Karakter merupakan watak, tabiat, adab, sifat, akhlak atau ciri yang melekat pada diri seseorang yang menggambarkan sifat yang akan membawa bagaimana

dirinya bertindak atau bersikap. Pendidikan karakter merupakan usaha untuk mendidik dan membentuk karakter anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif dalam masyarakatnya.

Pendidikan karakter yang dibangun dalam pendidikan mengacu pada pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomer 20 Tahun 2003, bahwa,

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Pendidikan karakter adalah upaya dalam proses menciptakan dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan pada diri peserta didik. Dengan melalui pengembangan nilai-nilai kebaikan pada diri peserta didik, di harapkan dapat mewujudkan perilaku baik. Penanaman nilai-nilai moral dan sosial harus lebih di tekankan kepada peserta didik sebagai upaya pembentukan karakter. Karakter yang wajib dimiliki peserta didik ialah religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas. Karakter itu harus ditunjukkan dalam bentuk tindakan maupun sikap. Sikap demokratis dirasa mampu merangkum ke lima karakter tersebut, dimana sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain, sikap peduli dan memberi kebebasan, sikap percaya diri, serta bersikap santun dan bermoral pada segala yang hendak di ucapkan, dan juga bersikap adil dalam pesmusyawarahan harus tercermin sebagai karakter yang melekat pada diri peserta didik.

¹ Novan Ardy Wijayani, *Membumikan Pendidikan Karakter di SD* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013). h.69

Salah satu mata pelajaran yang memiliki andil dalam penanaman nilai-nilai moral dan sosial yang berkarakter adalah Pendidikan Pancasila Kewargaan. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang dasar No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional menguraikan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang di rancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak secara dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya .

Peran tersebut diantaranya yaitu kebebasan memilih atau yang lebih dikenal dengan demokratis. Pendidikan kewarganegaraan dianggap cocok sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang di perluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar pancasila dan UUD 1945.

Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai luhur budaya bangsa harus selalu ditumbuhsurburkan pada setiap warga bangsa dan generasi penerus secara arif dan bijak melalui jalur pendidikan. Seperti bunyi sila ke 4 pancasila “kerakyataan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dimana setiap warga negara berkewajiban menanamkan sikap demokratis dengan bijak melalui permusyawaratan.

² *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, UU No.20 Tahun 2003, Pasal 37 ayat (1) dan (2).

Pemerintahan Indonesia yang bersifat demokrasi menjadikan masyarakatnya wajib bersikap demokratis. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku mendukung pemerintahan atau sistem politik demokratis. Artinya adalah bahwa demokrasi memberikan wadah atau tempat yang tinggi bagi nilai-nilai seperti individualisme, kebebasan memilih atau tidak saling bergantung, menghargai kemampuan individu, aturan-aturan maupun keanggotaan dalam kelompok.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat yang bebas dalam memilih tidak lantas menjadikan Indonesia menjadi Negara yang bebas dari berbagai masalah demokratis. Dalam praktik atau pelaksanaan demokrasi khususnya di Indonesia, demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejaterahan rakyat secara menyeluruh. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dilaksanakannya Pemilihan Umum Nasional Serentak atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.³ Penyelenggaraan pemilu serentak yang pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut nampaknya membawa beberapa dampak positif dan negatif bagi banyak kalangan terutama masyarakat. Salah satu dampak positif yang dirasa adalah adanya peningkatan partisipasi pemilih. Faktor keserentakan ini membuat perhatian dan partisipasi masyarakat lebih besar.

Namun, efek negatif juga terlihat nyata. Salah satunya adalah bahwa banyak jajaran penyelenggara tingkat TPS dibuat kerepotan dari sisi persiapan dan

³ Ratnia Solihah dan Universitas Padjadjaran, 'Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.3 No.1 (2018). h. 77 (Diunduh pada tanggal 18 Oktober 2019 Pukul 16.06 WIB).

pelaksanaan. Tak hanya itu, berbagai isu miring atau berita palsu nampaknya turut mewarnai penyelenggaraan pemilu serentak ini. Banyak sekelompok orang maupun individu saling menyebar berita palsu demi kepentingan segelintir kalangan melalui media sosial. Sikap saling hina dan merasa benar sendiri atas apa yang di pilih pun tak terelakan. Banyak masyarakat awam yang dibuat geram oleh berita-berita palsu tersebut, akhirnya mereka menjadi malas untuk menggunakan hak suara sehingga menurutnya golput adalah pilihan yang tepat. Tentu itu merupakan permasalahan moralitas demokrasi yang cukup serius bagi bangsa Indonesia masa kini.

Permasalahan demokratis ternyata tidak hanya terjadi pada masyarakat dewasa saja. Banyak anak-anak atau peserta didik di sekolah yang belum memahami betul makna demokratis yang sebenarnya. Akibatnya berbagai permasalahan demokratis pun muncul. Anak-anak seharusnya dibentuk agar memiliki kemampuan berempati secara baik⁴ supaya lebih mudah bergaul dengan teman-teman maupun lingkungannya guna memudahkannya dalam meraih kesuksesan dalam belajar, justru kini banyak yang bertindak anarkis yang menentang aturan-aturan yang berlaku secara egois. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh perilaku menyimpang masyarakat yang cenderung membuat batasan bagi orang lain yang sekiranya menghalangi kepentingan kebebasan pribadi mereka yang sifatnya tidak dapat di tolerir.⁵

Salah satu kenyataan itu terlihat pada saat peneliti melakukan observasi serta melaksanakan wawancara dengan seorang guru di salah satu Sekolah Negeri yang ada di wilayah Jakarta Pusat yaitu SDN KENARI 07 khususnya pada kelas III C. Peneliti

⁴ Akhmad Muhaimin Azzet, *Urgensi pendidikan Karakter di Indonesia* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016). h.46

⁵ Thomas Lickona, *Educating For Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012). H. 13

menemukan permasalahan demokratis yang cukup serius. Pada saat pengamatan peneliti melihat bahwa sebagian anak di kelas III C SDN KENARI 07 belum menunjukkan sikap atau karakter demokratis.

Peneliti mendapati wujud sikap tidak demokratis di kelas III C antara lain yaitu siswa cenderung pasif dan belum aktif dalam proses diskusi kelompok yang diadakan, siswa belum berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran, siswa belum mampu berpendapat dengan santun sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, bahkan siswa masih belum mampu untuk melaksanakan hasil keputusan bersama seperti pada saat kegiatan berkelompok diadakan proses pemilihan ketua kelompok dimana guru meminta semua anak berhak untuk mengajukan diri sebagai ketua kelompok. Namun ada beberapa siswa yang memaksa teman lainnya untuk memilih salah seorang teman menjadi ketua kelompok, yang mana tidak semua anak menyetujuinya. Namun beberapa anak itu terus memaksa sehingga menimbulkan konflik kecil di dalam kelas.⁶ Hal itu diperkuat oleh pernyataan Maman Sukmana selaku wali kelas kelas III C SDN KENARI 07 pada saat peneliti melakukan wawancara,⁷ yang menyatakan bahwa memang beberapa anak terlihat belum mampu memahami dan menerapkan sikap demokratis terutama pada saat proses pembelajaran di kelas dan terhadap teman sebayanya. Beliau mengatakan bahwa pada saat menjelaskan materi pelajaran, ada siswa yang tidak memperhatikan, bercanda dan lain sebagainya sehingga proses pembelajaran tidak kondusif. Terutama ketika diskusi kelompok, siswa belum bisa menyampaikan pendapatnya, siswa cenderung mengikuti pendapat teman

⁶ Pengamatan di kelas III C SDN Kenari 07, Pada Tanggal 25 Juli 2019 Pukul 09.10 WIB

⁷ Wawancara dengan Maman Sukmana M.M.Pd, Pada Tanggal 29 Juli 2019 Pada Pukul 12.20 WIB di Sekolah Dasar Negeri Kenari 07.

dekatnya. Tentu hal ini merupakan wujud nyata yang tidak mencerminkan sikap demokratis.

Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan moralitas demokrasi yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia termasuk dikalangan anak-anak melalui penanaman nilai demokratis. Untuk menanamkan sikap demokratis kepada anak, anak lebih dulu harus memahami bagaimana konsep demokrasi di lingkungannya. Demokrasi merupakan sebuah gagasan yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warganegara. Secara mutlak dapat dikatakan bahwa kekuatan tertinggi langsung ada di tangan rakyat. Secara umum demokrasi merupakan corak pemerintahan yang menjamin kemerdekaan dan kesamaan misalnya kemerdekaan berpikir dan mengemukakan pendapat, berkumpul, serta mengatur diri sendiri yang dilandasi oleh corak pemerintah.⁸

Menanggapi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan sikap demokratis siswa yang telah di uraikan, peneliti yang juga merupakan mahasiswa keguruan yang kelak akan menjadi seorang pendidik bermaksud untuk meneliti dan mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengkaji strategi pembelajaran maupun metode pembelajaran yang sesuai untuk menumbuhkan sikap demokratis khususnya di sekolah, serta memilih mata pelajaran yang cocok digunakan untuk menanamkan nilai demokratis kepada peserta didik. Peneliti mengkaji metode pembelajaran *Value Clarification Technique* sebagai model yang akan di terapkan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan sikap demokratis peserta didik. Selain memodifikasi

⁸ Nur Cahyati and others, 'Pengelolaan Pembelajaran Sikap Demokratis Di Smp Muhammadiyah 1 Kartasura', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25. No.2 (2015), h. 21.

teknik, keberhasilan proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh pemilihan materi yang sesuai.

Value Clarification Technique adalah teknik mengklarifikasi pendekatan nilai dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Peserta didik dibantu menjernihkan, memperjelas atau mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya, lewat diskusi, dialog dan presentasi.⁹ Misalnya adalah peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan nilai yang di anggap baik menurutnya. Jadi VCT (*value clarification technique*) mampu membantu peserta didik dalam memilah-milih atau mengkaji *feeling* (perasaan) dan *action* (perbuatan) sendiri untuk memberi keyakinan kepada mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Maksudnya adalah peserta didik tidak di paksa atau dipikirkan untuk menentukan nilai-nilai yang sudah ada, melainkan di bimbing untuk menentukan yang baik menurutnya, bertanggung jawab atas apa yang di pilihnya, serta menerapkan sikap dan melaksanakan nilai-nilai yang telah di pilihnya. Peranan guru disini adalah sebagai *role model* dalam proses penanaman sikap tersebut.

Metode Pembelajaran *Value Clarification Technique* cocok digunakan dalam pembelajaran PPKn karena sesuai dengan tujuan dari pembelajaran PPKn di jenjang Sekolah Dasar. Pada proses pembelajaran menggunakan metode VCT guru akan mengarahkan peserta didik untuk tidak memiliki keraguan pada diri siswa dan membimbing siswa untuk percaya diri terhadap potensi diri masing-masing siswa.

Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji serta memberikan gambaran bagaimana penerapan metode pembelajaran Teknik Mengklarifikasi Nilai (*Value Clarification*

⁹ Sutarjo Adisusilo, J.R, *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h.143-144

Technique) dalam pembelajaran. Berdasarkan konsep model pembelajaran ini dapat merangsang siswa untuk menemukan dan memahami materi yang diajarkan. Sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal, terutama pada upaya meningkatkan sikap demokratis siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengangkat masalah ini untuk penelitian yang berjudul " Analisis Metode Pembelajaran *Value Clarification Technique* Sebagai Alternatif dalam Meningkatkan Sikap Demokratis Siswa". Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Roni Rodyana bahwa sikap demokratis siswa kelas V di SDN Majalengka Kulon I, SDN Tarikolot I, SDN Tarikolot II, dan SDN Cikasarung, Majalengka setelah mengikuti pembelajaran PPKn dengan menerapkan model pembelajaran *Value Clarification Technique* dengan baik selama empat siklus mengalami peningkatan.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran bagaimana model *Value Clarification Technique* sebagai alternatif untuk meningkatkan sikap demokratis siswa.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka perlu adanya pembatasan fokus penelitian. Adapun penelitian ini difokuskan pada Analisis Metode Pembelajaran *Value Clarification Technique* Sebagai Alternatif Untuk Meningkatkan Sikap Demokratis Siswa.

¹⁰ Roni Rodyana, 'Media Publikasi Pada Bidang Pendidikan Dasar', *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol.5 No.1 (2019). h. 17. (Diunduh pada tanggal 27 September 2019 Pukul 20.16 WIB)

Value Clarification Technique adalah metode pembelajaran yang dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Metode ini sesuai dengan alam demokrasi, yang memungkinkan setiap peserta didik untuk memilih, menentukan, mengolah, dan mengembangkan nilai-nilainya sendiri, dengan pendampingan seorang pendidik. Sikap demokratis berarti sikap seseorang berlandaskan nilai-nilai demokrasi yang meliputi mengutamakan kepentingan bersama, toleransi, mampu mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda pendapat, menerima keputusan bersama secara lapang dada, terbuka, dan jujur. VCT cocok digunakan dalam pembelajaran PKn karena sesuai dengan tujuan dari pembelajaran PPKn di jenjang Sekolah Dasar.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus kajian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah metode pembelajaran *Value Clarification Technique* dapat meningkatkan sikap demokratis siswa?
2. Bagaimana cara meningkatkan sikap demokratis siswa melalui penerapan metode pembelajaran *Value Clarification Technique*?

D. Tujuan Kajian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari kajian ini adalah:

1. Memberi gambaran kepada pembaca tentang metode *Value Clarification Technique*,

2. Mengungkapkan cara penerapan metode pembelajaran *Value Clarification Technique*,
3. Mengungkapkan kegunaan metode pembelajaran *Value Clarification Technique* dalam meningkatkan sikap demokratis

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kajian mengenai Metode Pembelajaran *Value Clarification Technique* Sebagai Alternatif Untuk Meningkatkan Sikap Demokratis Siswa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Guru

Bagi guru, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai wawasan terutama tentang *Value Clarification Technique* yang dapat di gunakan sebagai masukan dan pertimbangan khususnya untuk proses pembelajaran PPKn dalam meningkatkan sikap demokratis siswa. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi guru untuk mengadakan inovasi-inovasi pembelajaran.

b. Bagi Kepala Sekolah

Melalui penelitian ini dapat dijadikan referensi dan usulan bagi kepala sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah dan kualitas lulusan dengan melakukan pembelajaran dengan metode pembelajaran VCT (*Value Clarification Technique*).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang metode *Value Clarification Technique*, dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

